

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengendalian pendanaan daerah yang diatur oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Pemendagri No. 13 Tahun 2006, seluruh kewajiban daerah digolongkan sebagai Belanja Daerah dan dicatat sebagai pengurangan terhadap nilai laba bersih untuk tahun anggaran yang berlaku. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah meningkat setiap tahunnya berbanding lurus dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Setiap tahun, APBD digunakan untuk menyusun rancangan belanja daerah. Fungsi belanja daerah terhadap APBD yaitu untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Dengan belanja daerah ini, tujuan dan komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan demi menangani sendiri keperluan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Menurut *Kainde* (2013: 64), besaran belanja daerah tergantung dari besarnya pemasukan daerah yang berkepentingan. Tentunya pemerintah daerah yang mendapat anggaran belanja pemerintah daerah yang mendapat anggaran belanja mesti sanggup menopang perluasan belanja daerah guna mensejahterakan warganya.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan menggunakan sumber pendapatan daerahnya sesuai dengan tujuan masyarakat daerah menjadi faktor dari perwujudan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut *Samad & Iyad* (2013:64) adanya kebijakan fiskal antar daerah sebagai akibat dari kebijakan kedaulatan daerah menyebabkan pemerintah pusat memberi bantuan berupa dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas penggunaan dana perimbangan, namun karena kewenangan tersebut, mereka harus mampu melakukannya secara efektif dan efisien guna memaksimalkan layanan umum. Dalam rangka memperluas aset daerah dan memaksimalkan layanan umum, pemerintah daerah harus menyisihkan banyak dana berupa perkiraan belanja modal dalam anggaran penghasilan dan belanja daerah.

Laporan perekonomian Provinsi Jambi Maret 2021, pandemik Covid-19 berdampak secara signifikan terhadap perekonomian global, tak terkecuali Provinsi Jambi. Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi melambat pada triwulan I dan III taun 2020. Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada triwulan III, namun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 diperkirakan lebih lambat dibanding tahun 2019. Hal ini dirasakan sebagai akibat logis dari menurunnya kinerja

semua sektor usaha, kecuali informasi dan komunikasi, akibat terbatasnya mobilitas masyarakat, aktivitas komersial dan produksi, serta meningkatnya kerja dan belanja secara online yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Triwulan IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,99% pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, menurun dari kontraksi triwulan III sebesar 0,85% dan penurunan dari pertumbuhan triwulan IV sebesar 3,41%.

Pada Tahun 2019 Pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,58 triliun rupiah atau naik 3,69% dari tahun sebelumnya. Dana tersebut sebesar 2,89 triliun rupiah dari dana perimbangan, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 1,65 triliun rupiah dan 27,35 miliar rupiah berasal dari pendapatan lainnya yang berlaku. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Pendapatan daerah lebih tinggi karena adanya peningkatan pada dana perimbangan, yaitu naik sebesar 4,11%. Dari ketiga sumber pendapatan daerah pada tahun 2020, persentasi sumber pemasukan daerah pemerintah Provinsi Jambi sebagian besar bersumber dari dana perimbangan yaitu 64,25%. Sedangkan dari PAD menyumbang sebesar 35,48%. (Sumber: <https://jambi.bps.go.id>)

Pertumbuhan Ekonomi serta pengaruh PDRB, PAD, Jumlah Penduduk, IPM terhadap Belanja Daerah pada tahun 2013 - 2015 di Sumatera Utara menjadi topik penelitian *Mohammad Yusuf (2018)*, dengan menggunakan pendekatan regresi panel. Dalam penelusurannya, terlihat bahwa belanja daerah di Sumatera Utara tidak signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, IPM, atau PAD. Sementara itu, belanja daerah Sumatera Utara dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB dan jumlah penduduk. Dalam penelitian *Masayu Rahma Wati Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan pada Belanja Daerah* terlihat bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempengaruhi Belanja Daerah. Dimana PAD dan Dana Perimbangan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Berlandaskan pendahuluan peneliti merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar **Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021.**

I.2 Tinjauan Pustaka

I.2.1. Pendapatan Asli Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Sanusi dan Mohammad Yusuf (2018) menyatakan pajak daerah, distribusi daerah, penyusunan sumber dari kekayaan yang dibedakan, serta pemasukan asli daerah lainnya sebagai pendanaan dan pembagian pembangunan daerah menjadi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian *Resti Januarti, dkk (2015-2019 : 9)* Adanya peningkatan pada pendapatan asli daerah membuat otomatis belanja daerah di suatu pemerintah daerah akan selalu meningkat, dan apabila terjadi meningkatnya belanja daerah selaras dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka bisa dikatakan daerah tersebut bisa mengurusi sumber daya dengan semestinya. Penelitian *Devita,dkk (2014:3)* tingkat produksi masyarakat akan mempengaruhi PAD di daerah yang mempunyai kesediaan sumber daya alam yang luas dan dibantu oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. Jika PAD suatu daerah mengalami peningkatan sehingga anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah juga mengalami peningkatan dan memungkinkan untuk menggali sumber-sumber potensi daerah dan meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan belanja daerah.

I.2.2.Pengaruh Dana Pertimbangan Terhadap Belanja Daerah

Mamuka & Elim (2014 : 64) Dana perimbangan diartikan sebagai pemasukan daerah dimana berasal dari APBN dalam rangka mewujudkan cita-cita perluasan otonomi daerah. Mereka sangat berguna sebagai peningkatan layanan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Menurut *Masayu Rahmawati (2017:72)*, dana perimbangan berbentuk bantuan, atau bisa juga dikatakan bahwa anggaran yang bersumber dari pemerintah dimana bertujuan untuk mengisi perbedaan anggaran dalam mendukung keperluan daerah dan menjalankan operasional pemerintah daerah. Terbukti bahwa dana daerah yang terkumpul dari kedua dana perimbangan tersebut mencakup semua anggaran keperluan daerah, termasuk kebutuhan untuk mendorong pembangunan daerah yang bisa bermanfaat bagi warganya. *Irfan Ferdiansyah (2018:47)* menyatakan bahwa pemerintah daerah didorong agar dapat mendukung belanja daerah dengan perimbangan keuangan dengan anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Karena masih menggunakan dana perimbangan pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, maka belanja daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan dana perimbangan. Pengeluaran belanja daerah lebih tinggi bagi pemerintah daerah yang memiliki dana perimbangan yang besar.

I.2.3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Belanja Daerah

Dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya, Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan bagaimana masyarakat mendapatkan hasil tersebut. IPM adalah metrik penting untuk menilai keberhasilan inisiatif untuk meningkatkan kualitas manusia (masyarakat/penduduk) karena IPM sering dijadikan tolak ukur untuk menentukan upaya peningkatan IPM. *BPS (2022)*

Menurut penelitian *Bayu Dwi Utomo (2019:14)*, IPM digunakan sebagai ukuran efektivitas pertumbuhan suatu daerah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah daerah tentang pemanfaatan belanja modal. Jika IPM meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat. Penelitian *Sari, et al. (2014 : 72)*, untuk mencapai kemandirian daerah dan kapasitas fiskal, serta untuk mendorong pembangunan daerah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal, IPM dapat menawarkan otoritas dan fleksibilitas dalam mendukung belanja daerah.

I.2.4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Perwira Jaya, Widanta (2014 : 204-205) Jumlah penduduk dapat diartikan dengan sekumpulan orang yang secara sah dapat menduduki suatu wilayah atau negara dan taat pada hukumnya. Jumlah penduduk dapat berdampak pada tingkat pendapatan daerah. Faktor utama yang sangat mempengaruhi pembangunan daerah adalah jumlah penduduk.

Berdasarkan riset *Liando dan Hermanto (2017 :10)* pertumbuhan penduduk dan peningkatan belanja daerah kabupaten/kota merupakan salah satu penyebab meningkatnya permintaan pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik di suatu daerah. Para perencana pembangunan melihat jumlah penduduk yang besar sebagai keuntungan dan juga beban bagi kemampuan pemerintah untuk maju. Menurut penelitian *Setyawan,Dkk (2019 : 10)*, pertumbuhan penduduk tidak berdampak pada anggaran daerah karena mempengaruhi banyaknya jumlah tenaga kerja yang berperan sebagai produsen dan konsumen barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan asli daerah.

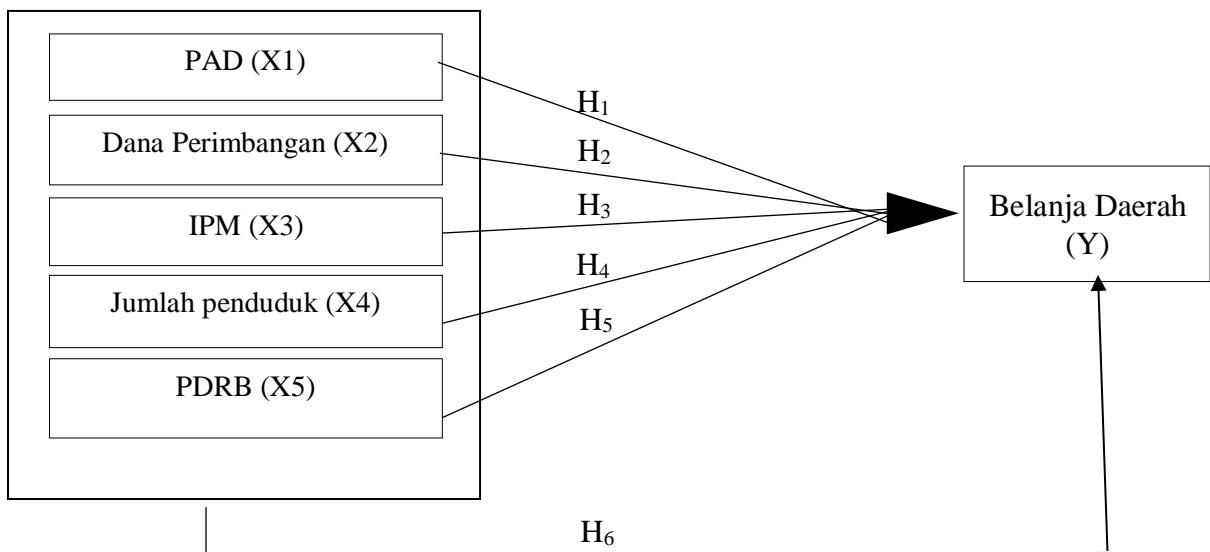
I.2.5. Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Daerah

BPS (2015) Nilai tambah unit bisnis di kawasan perumahan dikenal dengan istilah PDRB. PDRB merupakan ukuran penting dari ekspansi ekonomi di wilayah tertentu sebagai hasil dari semua kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Penelitian *Ulfah Nur Artikah (2019 : 15)* potensi sumber pendapatan daerah meningkat seiring dengan PDRB suatu daerah. Selain itu, akan digunakan untuk membayar program-program pembangunan daerah ketika pendapatan daerah meningkat. Pengeluaran daerah akan meningkat seiring dengan PDRB.

Penelitian oleh *Bambang Jatmiko (2018 : 6)* Pembangunan ekonomi diidentifikasi melalui meningkatnya produktivitas penduduk dan pendapatan perkapita. Hal ini mendorong peningkatan kesejahteraan yang terlihat dari perbaikan pelayanan publik termasuk hal yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedepan seperti sarana dan prasarana.

I.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

I. 4. Hipotesis Penelitian

H1 : PAD berpengaruh pada Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh pada Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021

H3 : IPM berpengaruh pada Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021

H4 : Jumlah Penduduk berpengaruh pada Belanja daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021

H5 : PDRB berdampak pada Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021.

H6 : PAD, Dana, Perimbangan, IPM, Jumlah Penduduk dan PDRB secara simultan mempunyai pengaruh pada Belanja Daerah Provinsi Jambi Periode 2017-2021.